

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Otonomi sekolah, sesungguhnya telah lama diperkenalkan di lingkungan pendidikan sejalan dengan berlangsungnya reformasi (pembaharuan) di bidang pendidikan. Otonomi sekolah pada prinsipnya memberikan otoritas kepada sekolah (dibawah kendali kepala sekolah) untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Rumah tangga sekolah itu menyangkut hampir seluruh aspek kependidikan dari proses pembelajaran, penentuan sarana-prasarana, pendukung, sumber daya manusia (tenaga kependidikan), kesiswaan, kebutuhan finansial.

Melalui otonomi sekolah, seluruh komponen yang terkait dengan sekolah punya kewajiban untuk saling mendukung demi optimalisasi peran sekolah dalam mendampingi anak bangsa menuju pada tingkat kedewasaan secara mental, fisik dan intelektual. Guru, karyawan, orang tua siswa, siswa, alumni dan masyarakat yang peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah itu, memiliki tanggungjawab yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sebuah sekolah.

Pengeluaran biaya pendidikan di atas terlihat bahwa secara keseluruhan merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh sekolah. Di sisi lain, terdapat juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa atau keluarganya berkaitan dengan beban kegiatan sekolah. Oleh karena itu, pemanfaatan biaya pendidikan yang terjadi pada seorang siswa berkaitan dengan kegiatan sekolah dapat berupa (1) uang pangkal/uang masuk, (2) luaran rutin sekolah, (3) ulangan, (4) kegiatan ekstra-kurikuler, (5) pratikum, (6) buku pelajaran/latihan/LKS, (7) buku dan alat-

alat tulis, (8) tas sekolah, (9) sepatu sekolah, (10) transportasi ke sekolah, (11) pakaian seragam ke sekolah, (12) pakaian olahraga, (13) les di sekolah oleh guru, (14) kursus/les di luar sekolah, (15) karya wisata, (16) sumbangan insidental, (17) uang saku/jajan siswa, dan (18) biaya lainnya (Supriadi, 2013:192).

Dalam konsep pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu di kaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan per siswa. Biaya satuan merupakan keseluruhan biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan (fatah,2002:11).

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pelaksanaan otonomi daerah (pendidikan) telah memiliki dasar yang kuat. Beberapa aturan yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi tersebut antara lain, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD:1999). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, dan banyak lagi Peraturan Pemerintah lainnya.

Konsep munculnya otonomi daerah (pendidikan) didasarkan pada pola pemikiran yang sangat baik. Yaitu menumbuhkembangkan inisiatif dan kreatifitas di tingkat daerah dan sekolah. pemerintah daerah berani mengatasi kekurangan guru, sekolah memiliki inisiatif untuk meningkatkan mutu guru, daerah memiliki anggaran yang memadai untuk pengadaan buku, daerah berani meningkatkan

kesejahteraan guru, dan masih banyak pemikiran yang mendasari munculnya otonomi daerah (sekolah). Namun satu hal yang perlu dipahami bahwa untuk membuat kebijakan yang selaras dengan kearifan lokal bukan merupakan hal yang mudah dilakukan. Sekolah dan daerah sangat memerlukan tenaga ahli yang sesuai untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan sekolah. Selama ini sumber daya manusia yang ada sudah terbiasa melakukan kegiatan yang bersifat rutin.

Satu hal yang harus diakui bahwa dengan desentralisasi pendidikan akan terwujud sebuah sistem manajemen sekolah yang benar-benar menekankan pada konsep kebhinekaan. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh sekolah dalam pelaksanaan otonomi pendidikan diantaranya berupa (1) kebijakan yang dibuat oleh sekolah dihadapkan pada kondisi faktual yang harus segera direspon, (2) sekolah harus mengelola sendiri sumber daya yang diperlukan (mencari dan memanfaatkannya, (3) masing-masing sekolah harus memiliki sumber daya manusia yang benar-benar profesional, (4) sekolah perlu memiliki kecerdasan yang memadai untuk dapat menyusun kurikulum yang benar-benar menjawab kebutuhan, (5) penyelenggaraan sekolah harus berbasis pada sosial budaya lokal di mana sekolah bertempat.

Sekolah adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang dimaksud adalah Staf Tata laksana Administrasi, Staf Teknis pendidikan didalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite sekolah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai.

Keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan anak didik. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. Pengelolaan keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah.

Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya.

Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit.

Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya yang menyebabkan sekolah pun semakin besar pengeluarannya.

Pengeluaran sekolah berkaitan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian berbagai macam sumber daya atau masukkan (input) proses

sekolah seperti tenaga administrasi, guru-guru, bahan-bahan, perlengkapan-perengkapan, dan fasilitas sehingga dibutuhkan manajemen keuangan yang baik dari stakeholder yang berada disekolah. Menurut Depdiknas (2002:12) kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban.

Pada observasi awal di SMA Negeri 1 Pinogaluman peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan otonomi sekolah khususnya dalam pengelolaan keuangan yaitu; 1) masih tidak adanya signifikansi hubungan antara pengeluaran uang dengan keberhasilan penyelenggaraan program sekolah, 2) Adanya kekeliruan dalam perencanaan pembelanjaan sekolah yang disusun melalui RAPBS, 3) belum lagi pemanfaatan anggaran yang kurang efektif sesuai dengan tujuan sekolah di SMA Negeri 1 Pinogaluman.

Akhirnya melalui adanya kegiatan manajemen keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman merupakan solusi yang efektif sehingga kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Dengan harapan keuangan sekolah dan untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti melaksanakan rancangan yang diformulasikan dalam judul "*Otonomi Sekolah Dalam pengelolaan keuangan Di SMA Negeri 1 Pinogaluman Kecamatan Pinogaluman*".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian ini kemudian dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemanfaatan keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Evaluasi (pertanggung jawaban) keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Untuk mengetahui evaluasi (pertanggung jawaban) keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi kepala sekolah, penelitian ini akan memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal.

2. Bagi guru dapat memberikan pemahaman dan manfaat dalam proses pengelolaan keuangan sekolah agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan.
3. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam upaya melaksanakan penelitian khususnya peningkatan pemahaman peneliti berkaitan dalam pengelolaan keuangan sekolah.